

ANALISIS PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN WISATA DESA ANJANI KECAMATAN SURALAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Muh Zulfi Walidaen¹, Rahmad Hidayat², M. Ariy Dermawan³

muhzulfiwalidaen@gmail.com¹, rahmad_dayat22@yahoo.com², ariy.dermawan@ummat.ac.id³

Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran Pemerintah Desa Anjani dalam pengelolaan objek wisata Kolam Embulan Boro' Dewi Anjani serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pengembangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Anjani berperan sebagai Motivator, fasilitator, Dinasmisator, dalam pengembangan wisata, yang diwujudkan melalui penyediaan sarana prasarana, promosi berbasis media digital, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan. Faktor pendukung meliputi potensi alam yang menarik, partisipasi masyarakat, dan kebijakan tarif yang terjangkau. Adapun faktor penghambat mencakup keterbatasan anggaran, rendahnya kapasitas sumber daya manusia di bidang pariwisata, serta fasilitas yang belum memadai. Temuan ini menegaskan bahwa tata kelola wisata berbasis kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat merupakan kunci dalam mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Pemerintah Desa, Pengelolaan Wisata, Desa Anjani, Kolaborasi, Pariwisata Berkelanjutan.

ABSTRACT

This study aims to thoroughly examine the role of the Anjani Village Government in managing the Kolam Embulan Boro' Dewi Anjani tourist attraction and to identify the supporting and inhibiting factors in its development. The research applies a descriptive qualitative method with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that the Anjani Village Government plays a role as a motivator, facilitator, and dynamizer in tourism development, realized through the provision of infrastructure, digital-based promotion, and community involvement in management. Supporting factors include attractive natural potential, community participation, and affordable pricing policies. Meanwhile, inhibiting factors consist of limited budget allocation, low capacity of human resources in the tourism sector, and inadequate facilities. These findings affirm that collaborative governance between the village government and the community is the key to achieving sustainable tourism development.

Keywords: Village Government, Tourism Management, Anjani Village, Collaboration, Sustainable Tourism.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan kearifan lokal. Regulasi ini memberikan ruang yang luas bagi pemerintah desa untuk mengoptimalkan potensi daerah, salah satunya melalui pengembangan sektor pariwisata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai pelaku utama dalam menggerakkan perekonomian berbasis masyarakat.

Desa Anjani yang terletak di Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, memiliki destinasi wisata Kolam Embulan Boro' Dewi Anjani yang menunjukkan perkembangan signifikan berkat sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat (Maturbongs & Lekatompessy, 2020). Meskipun demikian, pengelolaan destinasi ini masih dihadapkan pada sejumlah kendala, seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta fasilitas penunjang yang belum memadai (Amalia et al., 2024). Kondisi tersebut menegaskan urgensi dilakukannya evaluasi komprehensif terhadap peran pemerintah desa dalam tata kelola wisata, khususnya dalam menjalankan fungsi sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisor pembangunan berbasis lokal (Hasmiati, 2021; Alfianto, 2021).

Pariwisata berbasis desa dipandang sebagai strategi pembangunan lokal yang menempatkan potensi alam, budaya, serta kearifan lokal sebagai fondasi utama dalam pengembangan ekonomi masyarakat (Pitana & Gayatri, 2005; Laksono et al., 2020). Dalam kerangka kebijakan publik, desa wisata tidak hanya berfungsi sebagai instrumen peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan sosial dan pelestarian nilai budaya (UU No. 10 Tahun 2009; Putra & Dewi, 2023).

Pelayanan publik merupakan seluruh bentuk kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun instansi pelaksana demi memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, instansi pemerintah pada berbagai tingkatan memegang tiga fungsi inti, yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat, memfasilitasi pembangunan, serta memberikan perlindungan (Agustina et al., 2025).

Keberhasilan tata kelola institusi publik di tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh penerapan prinsip-prinsip transparansi, inklusivitas, dan kolaborasi lintas sektor—termasuk keterlibatan tokoh masyarakat, organisasi lokal, dan elemen pemuda (Junardi et al., 2025). Forum musyawarah deliberatif menjadi wadah penting bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan dasar, menyepakati prioritas penganggaran, serta mengawal akuntabilitas pelaksanaan program agar sejalan dengan kepentingan public (Junardi et al. (2025)

Pengelolaan administrasi dan pelayanan berbasis digital di tingkat pemerintahan lokal memerlukan dukungan infrastruktur TIK dan kapasitas SDM yang kuat agar terlaksana secara optimal (Hidayat, 2025).

Hidayat dan Dermawan (2025) menekankan bahwa tata kelola yang efektif tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat dan pemanfaatan inovasi teknologi. Perspektif ini memberikan kerangka konseptual yang relevan untuk mengkaji pengelolaan wisata Desa Anjani. Dalam konteks lokal, regulasi desa berupa Peraturan Desa tentang tiket masuk dan parkir menjadi instrumen hukum yang mendukung pengelolaan wisata. Partisipasi masyarakat diwujudkan melalui peran Pokdarwis dan keterlibatan warga dalam penyediaan layanan wisata, sementara inovasi teknologi tampak pada penggunaan media sosial sebagai sarana promosi. Analisis peran pemerintah desa dalam pengelolaan wisata tidak hanya menyoroti fungsi motivator, fasilitator, dan dinamisor, tetapi juga mengungkap bagaimana integrasi regulasi, partisipasi, dan teknologi membentuk tata kelola wisata berbasis kolaborasi yang berkelanjutan.

Kolaborasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan wisata Desa Anjani terbukti memberikan dampak nyata terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Kurniawan (2021) menegaskan bahwa keberhasilan desa wisata sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat terlibat dalam setiap proses pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari data pengunjung Kolam Embulan Boro' Dewi Anjani yang terus meningkat setiap tahunnya, seiring dengan adanya dukungan program

desa wisata rintisan dari Kemenparekraf serta bantuan fasilitas dari pemerintah pusat

Penetapan tarif masuk Kolam Embulan Boro' Dewi Anjani memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu Peraturan Desa Anjani Nomor 2 Tahun 2025 Pasal 14 tentang karcis masuk kolam. Berdasarkan sumber dari pengelola wisata kolam embulan boro' dewi anjani, tiket masuk Kolam Embulan Boro' Dewi Anjani ditetapkan dengan harga yang relatif murah, yaitu Rp3.000 untuk anak-anak, Rp5.000 untuk dewasa

Tabel 1 Harga Tiket Masuk Kolam Embulan Boro' Dewi Anjani

No	Kategori	Harga (Rp)
1	Anak-anak	3.000
2	Dewasa	5.000

Sumber : Perdes Anjani 2025

Kebijakan penetapan harga yang terjangkau ini menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam memberikan akses wisata yang inklusif bagi masyarakat sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam pengembangan potensi lokal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 15, Pemerintah Desa berkewajiban mengelola potensi desa sebagai bagian dari penyelenggaraan otonomi desa. Tujuan pengelolaan tersebut antara lain peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, penguatan demokrasi, penghormatan terhadap budaya lokal, serta pemanfaatan potensi dan keanekaragaman daerah. Hal ini sejalan dengan upaya Desa Wisata Kolam Embulan Boro' Dewi Anjani dalam mengoptimalkan potensi wisata berbasis masyarakat.

Penetapan tarif parkir di Kolam Embulan Boro' Dewi Anjani diatur dalam Peraturan Desa Anjani Nomor 2 Tahun 2025 Pasal 15 tentang karcis parkir, sehingga kebijakan tarif ini memiliki legitimasi formal. Dalam pengelolaan Desa Wisata Kolam Embulan Boro' Dewi Anjani, aspek keterjangkauan tarif menjadi salah satu strategi penting dalam menarik minat wisatawan.

Tabel 2 Harga Tarif Parkir Kendaraan Di Kolam Embulan Boro' Dewi Anjani

No	Kategori	Harga (Rp)
1	Roda Dua	2.000
2	Roda Tiga	3.000
3	Roda Empat	5.000

Sumber : Perdes Anjani 2025

Berdasarkan sumber dari pengelolaan wisata Kolam Embulan Boro Dewi Anjani, tarif parkir ditetapkan dengan harga yang relatif murah, yaitu Rp2.000 untuk Roda Dua, Rp3.000 Roda Tiga, dan Rp5.000 Roda Empat. Kebijakan penetapan tarif yang terjangkau ini mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam menyediakan akses wisata yang inklusif, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal dalam mendukung keberlanjutan pengembangan potensi wisata desa

Selain itu, kebijakan tarif yang murah, baik tiket masuk maupun tarif parkir mencerminkan strategi pemerintah desa dalam menciptakan akses wisata yang inklusif. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan daya tarik wisatawan, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan wisata. Dengan demikian, perkembangan Desa Wisata Kolam Embulan Boro' Dewi Anjani merupakan hasil dari kombinasi antara peningkatan fasilitas, keterjangkauan harga, serta kolaborasi aktif antara pemerintah desa dan masyarakat agar dapat meningkatkan daya tarik serta keberlanjutan pengembangan desa wisata.

Tabel 3 Data Fasilitas Objek Wisata Kolam Embulan Boro` Dewi Anjani

No	Fasilitas	Satuan	Jumlah
1	Kolam dewasa	2	Unit
2	Kolam anak	2	Unit
3	Toilet	6	Unit
4	Parkir	1	Unit
5	Musholla	1	Unit
6	Pos jaga	1	Unit
7	Kantin	10	Unit
8	Gazebo (beruga)	21	Unit
9	Kamar Ganti	4	Unit
10	Homstay (Penginapan)	2	Unit

Sumber : Pengelola Wisata Kolam Embulan Boro` Dewi Anjani 2026

Dari tabel 3 dapat kita lihat fasilitas yang ada di Objek Wisata Kolam Embulan Boro` Dewi Anjani. Fasilitas yang disediakan oleh pihak pengelola dapat dikatakan masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pengunjung. Apabila dibandingkan dengan jumlah kunjungan yang terus meningkat, seharusnya fasilitas yang tersedia disesuaikan dengan kapasitas wisatawan yang datang ke Kolam Embulan Boro` Dewi Anjani. Selain itu, fasilitas yang ada perlu dirawat secara berkelanjutan karena pada saat penelitian dilakukan ditemukan beberapa sarana yang kondisinya kurang terawat bahkan ada yang rusak.

Pemerintah desa memiliki kedudukan penting sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat lokal. Menurut PP No. 43 Tahun 2014, pemerintah desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan tradisi yang ada. Peran ini mencakup aspek pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Wisata (Pitana & Gayatri, 2005)

1. Motivator

- Edukasi masyarakat Pemerintah desa berperan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan wisata berbasis lokal. Di Kolam Embulan Boro` Dewi Anjani, edukasi dilakukan melalui sosialisasi tentang kebersihan lingkungan dan pentingnya menjaga fasilitas wisata.
- Promosi Pemerintah desa mendorong promosi wisata melalui media lokal, event tahunan, dan kerja sama dengan Pokdarwis. Misalnya, event tahunan Desa Anjani berhasil meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.
- Inovasi Pemerintah desa menciptakan ide-ide baru untuk meningkatkan daya tarik wisata. Contohnya, pengembangan fasilitas tambahan seperti gazebo, musala, dan area parkir yang didukung DAK.

2. Fasilitator

- Infrastruktur Pemerintah desa menyediakan dan memperbaiki sarana prasarana wisata. Di Kolam Embulan Boro` Dewi Anjani, pembangunan kamar mandi, musala, dan area parkir menjadi bentuk nyata fasilitasi.
- Sumber daya manusia (SDM) Pemerintah desa meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan

3. Dinamisor

- Kebijakan Pemerintah desa menetapkan aturan dan kebijakan yang mendukung pengembangan wisata. Misalnya, penetapan tarif masuk dan parkir yang terjangkau sebagai kebijakan inklusif.
- Pelatihan Pemerintah desa memberikan pelatihan kepada masyarakat agar lebih siap

dalam mengelola wisata. Pelatihan kebersihan, pelayanan wisata, dan pengelolaan fasilitas dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan.

Berdasarkan kerangka Pitana dan Gayatri (2005), peran pemerintah desa dalam pengembangan Desa Wisata Kolam Embulan Boro' Dewi Anjani dapat dilihat dari fungsi sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator. Sebagai motivator, pemerintah desa melakukan edukasi, promosi, dan inovasi untuk meningkatkan daya tarik wisata. Sebagai fasilitator, pemerintah desa menyediakan infrastruktur dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan. Sedangkan sebagai dinamisator, pemerintah desa menetapkan kebijakan tarif yang terjangkau serta memberikan pelatihan bagi masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam pengelolaan wisata. Peran-peran tersebut menjadi kunci dalam mendukung keberlanjutan pengembangan Desa Wisata Kolam Embulan Boro' Dewi Anjani.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini akan bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai peran pemerintah desa dalam pengelolaan wisata Desa Anjani. Menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan mengungkap fenomena secara holistik dan kontekstual dengan peneliti sebagai instrumen utama (Fadli & Rangkuti 2025). Pendekatan ini akan memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara langsung dari informan terkait bagaimana pemerintah desa menjalankan fungsi dan perannya dalam mengelola potensi wisata yang ada. Dengan demikian, pemahaman terhadap proses, kebijakan, dan interaksi sosial yang terjadi dalam pengelolaan wisata desa. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan karena sejalan dengan tujuan penelitian yang ingin menganalisis secara mendalam peran pemerintah Desa Anjani dalam pengelolaan wisata desa.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara komprehensif melalui pengamatan langsung, wawancara, dan pengumpulan data yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan. Purposive sampling dipilih karena peneliti membutuhkan informan yang dianggap paling mengetahui, memahami, dan terlibat langsung dalam pengelolaan wisata Desa Anjani, khususnya di objek wisata *Kolam Embulan Boro' Dewi Anjani*. Informan ditentukan berdasarkan peran dan keterlibatan mereka, seperti kepala desa, perangkat desa, pengelola BUMDes, tokoh masyarakat, serta pelaku usaha wisata lokal.

Menurut Sugiyono (2017:85), purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Hal ini sejalan dengan pendapat (Fadli & Rangkuti 2025) yang menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, pemilihan informan dilakukan secara sengaja untuk memperoleh data yang mendalam dan relevan dengan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Wisata Kolam Embulan Boro' Dewi Anjani

Menurut Pitana dan Gayatri (2005), peran pemerintah desa dalam pengembangan objek wisata dapat dikategorikan ke dalam tiga fungsi utama, yaitu sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisator. Sebagai motivator, pemerintah desa berperan dalam memberikan dorongan, edukasi, promosi, serta inovasi agar masyarakat memiliki

kesadaran dan semangat dalam mengembangkan potensi wisata.

1. Sebagai fasilitator

Pemerintah desa menyediakan sarana dan prasarana, termasuk infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia, sehingga masyarakat memiliki dukungan nyata untuk mengelola wisata secara berkelanjutan. Sementara itu, sebagai dinamisor, pemerintah desa berperan dalam merumuskan kebijakan, menyelenggarakan pelatihan, dan menciptakan regulasi yang mendukung keberlanjutan pengelolaan wisata. Berdasarkan data lapangan, wawancara, dan dokumentasi, ditemukan beberapa temuan utama: Motivator

a. Edukasi Masyarakat

Edukasi dan Sosialisasi Kebersihan Wisata Desa dalam upaya menjaga keberlanjutan pengelolaan wisata, Pemerintah Desa Anjani secara aktif melaksanakan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kebersihan lingkungan wisata. Sosialisasi ini dilakukan secara rutin, baik melalui pertemuan desa, kegiatan gotong royong, maupun saat pelaksanaan event wisata tahunan di kawasan Kolam Embulan Boro' Dewi Anjani. Pemerintah desa menekankan bahwa kebersihan merupakan bagian dari citra destinasi wisata dan menjadi tanggung jawab bersama antara pengelola, masyarakat, dan pengunjung.

Gambar 1 Pemerintah Desa melaksanakan sosialisasi bersama masyarakat



Sumber : Kantor Desa Anjani 2026

Melalui kegiatan ini, masyarakat semakin menyadari bahwa kebersihan bukan hanya tanggung jawab pemerintah desa, tetapi juga menjadi bagian dari budaya lokal yang harus dijaga. Edukasi kebersihan yang dilakukan secara berkelanjutan telah menumbuhkan kesadaran kolektif dan memperkuat nilai-nilai gotong royong dalam pengelolaan wisata. Dengan demikian, sosialisasi kebersihan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Anjani tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas lingkungan wisata, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter masyarakat yang peduli terhadap kelestarian alam dan kenyamanan pengunjung.

b. Promosi

Dalam era digital, media sosial menjadi instrumen utama dalam strategi promosi pariwisata. Keberadaan platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok memungkinkan desa wisata untuk memperluas jangkauan promosi secara cepat, murah, dan efektif. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ruang interaktif yang membangun citra destinasi, memperkuat identitas budaya, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat. Bagi Desa Wisata Anjani, pemanfaatan media sosial merupakan langkah strategis untuk memperkenalkan potensi alam, budaya, dan

tradisi lokal kepada audiens yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam upaya memperluas jangkauan promosi wisata, Pemerintah Desa Anjani memanfaatkan media sosial sebagai sarana publikasi dan komunikasi. Pemanfaatan akun resmi di Facebook, Instagram, dan TikTok menjadi strategi digital yang bertujuan untuk memperkenalkan daya tarik Kolam Embulan Boro' Dewi Anjani, menyebarkan informasi kegiatan, serta membangun interaksi dengan masyarakat dan wisatawan secara lebih luas.

Gambar 2 Akun sosial media Facebook



Gambar 3 Akun Sosial Media TikTok



Gambar 4 Akun sosial media Instagram



Sumber : Data Olahan Peneliti 2026

Hasil wawancara dengan ketua tim pengelola wisata menunjukkan bahwa promosi digital telah menjadi salah satu strategi utama dalam pengembangan Desa Wisata Anjani. Data jumlah pengikut yang cukup besar di berbagai platform media sosial (Instagram 3.610, Facebook 38.000, dan TikTok 35.900) mencerminkan adanya minat dan keterlibatan publik yang tinggi terhadap konten yang diproduksi.

Konten yang ditampilkan, seperti kegiatan event, perkembangan kondisi kolam setiap hari, serta keindahan alam desa, menjadi faktor penting dalam membangun citra

positif destinasi wisata.

Ke depan, strategi promosi digital ini dapat terus diperkuat melalui konsistensi konten, diversifikasi materi promosi, serta kolaborasi dengan pihak eksternal seperti influencer pariwisata dan media lokal. Hal ini sejalan dengan konsep branding destinasi yang menekankan pentingnya visualisasi digital untuk memperluas jangkauan pasar.

Dengan demikian, promosi digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana informasi, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, memperkuat partisipasi masyarakat, dan mendukung keberlanjutan pengelolaan wisata desa.

c. Inovasi

Dalam konteks pengembangan desa wisata, pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting sebagai penggerak utama. Keberhasilan pengelolaan objek wisata tidak hanya bergantung pada potensi alam dan budaya yang dimiliki, tetapi juga pada inovasi dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat.

Pemerintah desa berfungsi sebagai motivator yang mendorong partisipasi warga, fasilitator yang menyediakan sarana prasarana pendukung, serta dinamisor yang menetapkan kebijakan dan menginisiasi program-program wisata.

Inovasi yang dilakukan mencakup penyediaan infrastruktur, pemanfaatan teknologi digital untuk promosi, pengembangan program wisata edukatif berbasis tradisi lokal, penyelenggaraan event tahunan. Dengan adanya inovasi tersebut, pengembangan objek wisata di Desa Anjani tidak hanya memperkuat citra destinasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan ekonomi lokal dan pelestarian budaya. Berikut inovasi perkembangan yang terstruktur.

Tabel 4 Inovasi Pemerintah Desa Anjani

Aspek Inovasi	Bentuk Penyediaan	Tujuan/Dampak	Peran Pemerintah Desa
Infrastruktur Wisata	Gazebo, musholla, kamar mandi, area parkir	Meningkatkan kenyamanan wisatawan dan memperkuat daya tarik destinasi	Fasilitator
Digitalisasi Promosi	Media sosial (YouTube, IG, FB, TikTok).	Memperluas jangkauan promosi hingga nasional/internasional, membangun citra desa	Motivator & Fasilitator
Wisata Edukatif	Program famtrip berbasis tradisi: nandur, ngater, petik kangkung, begasap	Memberikan pengalaman otentik, memperkenalkan budaya lokal, meningkatkan nilai edukatif	Dinamisator
Event Tahunan	Penyelenggaraan <i>Begasap Festival</i> dan <i>Bejango Desa</i> , dihadiri Gubernur NTB & Bupati Lombok Timur	Meningkatkan legitimasi, memperkuat citra budaya, menarik wisatawan, melibatkan masyarakat	Dinamisator & Fasilitator
Ekonomi Lokal	Integrasi UMKM desa dalam paket wisata (kuliner, produk lokal)	Meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat ekonomi desa berbasis wisata	Fasilitator & Motivator

Sumber : Perangkat desa anjani 2026

Gambar 7 Event bejango Desa Anjani



Sumber : Data Olahan Peneliti 2026

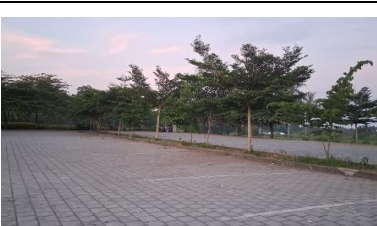
2. Fasilitator

a. Infrastruktur

Penyediaan infrastruktur oleh pemerintah desa merupakan salah satu bentuk nyata peran fasilitator dalam pengembangan objek wisata. Infrastruktur yang tersedia tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendukung aktivitas wisatawan, tetapi juga menjadi indikator kesiapan destinasi dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Data lapangan menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menyediakan berbagai fasilitas seperti kolam renang dewasa dan anak, toilet, area parkir, musholla, pos jaga, kantin, gazebo (beruga), kamar ganti, serta homestay. Setiap fasilitas tersebut memiliki fungsi spesifik yang mendukung kenyamanan, keamanan, dan pengalaman wisatawan secara menyeluruh.

Penyediaan fasilitas ini sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam membangun destinasi wisata yang berkelanjutan, ramah pengunjung, serta mampu mengintegrasikan kebutuhan rekreasi dengan pemberdayaan ekonomi lokal. Untuk lebih jelasnya, berikut disajikan tabel penyediaan infrastruktur yang telah diupayakan oleh pemerintah desa.

Tabel 5 Penyediaan Infrastruktur Objek Wisata Desa Anjani

Jenis Fasilitas	Jumlah	Bentuk Penyediaan oleh Pemerintah Desa	Foto Dokumentasi
Kolam Dewasa	2 Unit	Pembangunan kolam renang khusus dewasa sebagai sarana rekreasi utama wisatawan	
Kolam Anak	2 Unit	Penyediaan kolam khusus anak dengan desain aman dan ramah keluarga	
Toilet	6 Unit	Pembangunan fasilitas sanitasi untuk mendukung kenyamanan dan kebersihan pengunjung	
Area Parkir	1 Unit	Penyediaan lahan parkir yang memadai untuk kendaraan wisatawan	

Musholla	1 Unit	Pembangunan tempat ibadah sebagai fasilitas penunjang berbasis kebutuhan spiritual	
Pos Jaga	1 Unit	Penyediaan pos keamanan untuk menjaga ketertiban dan keselamatan pengunjung	
Kantin	10 Unit	Pembangunan kantin sebagai pusat kuliner lokal dan sarana pemberdayaan UMKM desa	
Gazebo (Beruga)	21 Unit	Penyediaan gazebo/beruga sebagai tempat istirahat, interaksi sosial, dan daya tarik visual	
Kamar Ganti	4 Unit	Pembangunan kamar ganti untuk mendukung aktivitas wisata air dan kenyamanan pengunjung	
Homestay (Penginapan)	2 Unit	Penyediaan homestay berbasis masyarakat untuk mendukung wisata berbasis komunitas dan ekonomi lokal	
Perbaikan Akses Jalan		Akses jalan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan destinasi wisata.	

Sumber: Data Observasi Lapangan 2026

Penyediaan sarana penunjang wisata oleh Pemerintah Desa Anjani menunjukkan adanya komitmen yang kuat dalam menjalankan fungsi fasilitator bagi pengembangan destinasi. Data lapangan memperlihatkan bahwa desa telah membangun berbagai fasilitas yang bersifat mendasar sekaligus penunjang, seperti kolam renang dewasa dan anak, toilet, area parkir, musholla, pos jaga, kantin, gazebo (beruga), kamar ganti, serta homestay. Setiap fasilitas tersebut memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam mendukung kenyamanan, keamanan, dan pengalaman wisatawan.

Kolam renang dan gazebo berfungsi sebagai sarana rekreasi utama, sementara toilet, kamar ganti, dan musholla menjadi fasilitas dasar yang wajib tersedia untuk menjaga kebersihan dan kebutuhan spiritual pengunjung. Pos jaga dan area parkir memperlihatkan

perhatian terhadap aspek keamanan dan aksesibilitas, sedangkan kantin dan homestay menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan UMKM lokal dan penyediaan penginapan berbasis komunitas.

b. Sumber daya manusia (SDM)

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan pada destinasi wisata, Pemerintah Desa Anjani fokus pada pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Upaya ini dilakukan melalui berbagai program pelatihan, salah satunya pelatihan keamanan dan keselamatan bagi para pengelola serta petugas wisata.

Tabel 6 Data Pelatihan SDM dan peserta / Petugas Desa Wisata Anjani

No	Jenis Pelatihan/ Kegiatan	Fokus Pelatihan	Peserta/ Petugas	Lokasi/ Destinasi
1	Pelatihan keamanan dan keselamatan	Keamanan dan keselamatan daya Tarik wisata	Petugas/ pengelola wisata dan masyarakat	Kolam Embulan Boro' Dewi Anjani

Sumber : Data observasi lapangan 2026

Berdasarkan Tabel 6 di atas, terlihat bahwa pelibatan petugas dan masyarakat setempat dalam pelatihan keamanan di Wisata Kolam Embulan Boro' Dewi Anjani menjadi langkah strategis. Kehadiran petugas yang terlatih ini diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap wisatawan yang berkunjung.

Pemerintah Desa Anjani memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat melalui pelatihan yang berfokus pada aspek keamanan dan keselamatan di daya tarik wisata Kolam Embulan Boro' Dewi Anjani. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman dan keterampilan praktis kepada masyarakat dalam menjaga keselamatan pengunjung, termasuk penanganan keadaan darurat, pencegahan risiko, serta pemeliharaan fasilitas agar tetap aman digunakan. Upaya tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan teknis warga, tetapi juga membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya standar keselamatan dalam pengelolaan destinasi wisata.

Dalam perspektif akademis, kegiatan pelatihan ini merupakan bagian dari *capacity building* yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Dengan adanya pelatihan keamanan dan keselamatan, masyarakat lebih siap menghadapi potensi risiko, mampu memberikan pelayanan yang lebih profesional, serta memperkuat citra Desa Anjani sebagai destinasi wisata yang aman dan ramah bagi pengunjung. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan SDM melalui pelatihan menjadi salah satu fondasi penting bagi keberlanjutan pengelolaan wisata desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis peran Pemerintah Desa Anjani dalam pengelolaan objek wisata Kolam Embulan Boro' Dewi Anjani, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Desa Anjani telah menjalankan tiga peran utamanya (sesuai kerangka teori Pitana & Gayatri) secara efektif:
 - a. Sebagai Motivator Pemerintah desa aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kebersihan lingkungan secara berkala, menggalakkan promosi digital melalui media sosial (Facebook, Instagram, TikTok), serta menginisiasi inovasi seperti penyelenggaraan event tahunan budaya (Begasap Festival dan Bejango Desa).
 - b. Sebagai Fasilitator Pemerintah desa menyediakan dan membangun infrastruktur fisik pendukung wisata (kolam renang dewasa/anak, toilet, musholla, area parkir, kantin UMKM, gazebo/beruga, kamar ganti, homestay, serta perbaikan akses jalan)

- dan memfasilitasi peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan keamanan dan keselamatan.
- c. Sebagai Dinamisator Pemerintah desa menerbitkan regulasi penetapan harga tiket masuk dan tarif parkir yang terjangkau melalui Peraturan Desa Anjani Nomor 2 Tahun 2025, serta mengintegrasikan potensi UMKM dan tradisi lokal ke dalam paket wisata.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat:
- a. Faktor Pendukung Potensi alam yang alami/tanpa kaporit, partisipasi aktif masyarakat melalui gotong royong dan partisipasi Pokdarwis/BUMDes, legitimasi regulasi desa, kebijakan harga tiket/parkir yang terjangkau dan inklusif, serta promosi digital yang menjangkau audiens luas.
 - b. Faktor Penghambat Keterbatasan alokasi anggaran pembangunan, kapasitas SDM di bidang pariwisata yang masih relatif rendah dan belum merata, serta ketersediaan sarana/fasilitas yang belum sepenuhnya sebanding dengan lonjakan jumlah pengunjung serta adanya beberapa fasilitas yang kurang terawat/rusak.
 - c. Tata Kelola Kolaboratif Temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan dan keberlanjutan pengembangan pariwisata Desa Anjani sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi yang erat antara pemerintah desa, pengelola, dan masyarakat lokal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemeliharaan dan Penambahan Fasilitas: Pemerintah Desa bersama pihak pengelola perlu melakukan pemeliharaan rutin (maintenance) terhadap fasilitas yang ada (seperti toilet, kamar mandi, dan gazebo) serta menambah unit fasilitas penunjang guna mengimbangi tren peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.
2. Penguatan Kapasitas SDM Berkelanjutan: Pelatihan bagi pengelola dan masyarakat lokal hendaknya diperluas tidak hanya pada aspek keamanan/keselamatan, tetapi juga mencakup manajemen pemasaran digital, hospitality (pelayanan wisatawan), kebersihan lingkungan, dan manajemen tata kelola keuangan pariwisata.
3. Optimalisasi Anggaran dan Kemitraan Eksternal: Untuk mengatasi keterbatasan anggaran desa, pemerintah desa disarankan memperluas jaringan kerja sama (networking) dengan pihak swasta melalui CSR, perguruan tinggi (pendampingan akademis), serta mengajukan dukungan dana pembinaan/DAK dari pemerintah daerah maupun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).
4. Diversifikasi dan Konsistensi Promosi Digital: Meningkatkan konsistensi dan keanekaragaman konten promosi pada platform media sosial serta menjalin kolaborasi dengan influencer pariwisata untuk memperkuat destination branding Desa Anjani di tingkat nasional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, N., Hidayat, R., Dermawan, A., & Hadi, A. (2025). Universal Health Coverage and hospital service satisfaction in socio-economically vulnerable tourism areas. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 6(2), 117-134.
- Alfianto, N. (2021). Peran pemerintah desa dalam pengembangan potensi pariwisata berbasis masyarakat. *Jurnal Kebijakan Publik dan Otonomi Daerah*, 9(1), 45–58.
- Amalia, R., Rahmawati, S., & Lestari, D. (2024). Analisis kendala pengembangan destinasi wisata berbasis desa di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 8(1), 1225.
- Fadli, M., & Rangkuti, A. (2025). Metodologi Penelitian Kualitatif dan Deskriptif dalam Ilmu

- Sosial. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasmiati. (2021). Peran pemerintah desa sebagai motivator, fasilitator, dan dinamisor dalam pembangunan desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 110–122.
- Hidayat, R. (2025). Critical factors influencing the implementation of digital government: The case of population administration service. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 9(3), 710–726.
- Hidayat, R., Agustina, N., & Dermawan, M. A. (2025). Evaluasi Praktik Meritokrasi dalam Kebijakan Publik di Indonesia: Pendekatan Bibliometrik dan Psikometrik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 15(2).
- Junardi, N., Safitri, N. I., Hairunnisah, S., Anggriani, R., Aprilia, R., Adawyah, S., & Hidayat, R. (2025). Evaluation of the utilization of health services at the Sekotong Community Health Center in a review of the New Public Service (NPS) theory. *Jurnal Ilmiah Detubuya*, 3(1), 28–38.
- Kurniawan, A. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata rintisan. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 18(3), 201–215.
- Laksono, B., Triyono, A., & Wibowo, S. (2020). Penguatan kearifan lokal dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Pariwisata*, 11(2), 89–101.
- Maturbongs, F., & Lekatompessy, R. (2020). Kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata lokal. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 7(2), 77–91.
- Pemerintah Desa Anjani. (2025). Peraturan Desa Anjani Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tiket Masuk dan Tarif Parkir Objek Wisata Kolam Embulan Boro' Dewi Anjani. Lombok Timur: Pemerintah Desa Anjani.
- Pitana, I. G., & Gayatri, P. G. (2005). *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Putra, I. M., & Dewi, R. K. (2023). Kebijakan publik dan pemberdayaan masyarakat melalui sektor pariwisata desa. *Jurnal Tata Kelola & Kebijakan Publik*, 10(1), 33–46.
- Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.